

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG PADA KPRI
KOKARDAN**

Adrin Nuradha Diana

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Institut Manajemen Koperasi, Indonesia
adrinnuradha17@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Pancasila dan UUD 1945 menyebutkan bahwa tiga pelaku ekonomi yang mendasari sistem perekonomian Indonesia yaitu BUMN, BUMS, dan Koperasi. Terdapat banyak jenis koperasi yang ada di Indonesia yang terbagi dari jenis koperasi berdasarkan tingkatannya dan jenis usahanya. Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam di dalamnya pasti terdapat piutang yang besar.

Tujuan penelitian: Mengetahui keberadaan sistem pengendalian internal, prosedur sistem pengendalian internal piutang, penilaian sistem pengendalian internal piutang dan mengetahui upaya perbaikan sistem pengendalian internal piutang.

Metode penelitian: Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi pustaka..

Hasil penelitian: Keadaan sistem pengendalian internal piutang kurang efektif hal ini dapat dilihat dari belum semua terlaksananya komponen COSO. Prosedur sistem pengendalian internal sudah cukup baik hal ini dilihat dari adanya pengajuan dari anggota sampai tahap monitoring ke anggota. Penilaian sistem pengendalian internal kurang efektif hal ini dilihat dari tidak adanya pemisahan fungsi piutang dan tidak dilakukannya rotasi jabatan, laporan potongan Tukin tidak disampaikan kepada anggota dan piutang ragu-ragu tidak diperiksa.

Kesimpulan: Keberadaan sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokardan yaitu jika dilihat dari komponen COSO. Prosedur sistem pengendalian internal piutang berjalan dengan cukup baik hal ini ditandai dengan adanya prosedur awal tahap pemberian pinjaman dengan mengajukan formulir permohonan pinjaman di bagian kartu. Penilaian sistem internal pengendalian internal piutang kurang efektif meskipun ada yang telah dilakukan. Upaya perbaikan sistem pengendalian piutang dengan sistem pengendalian internal yaitu KPRI Kokardan harus memperbaiki komponen yang belum terlaksana

Kata kunci: *Sistem, Pengendalian Internal, Audit, Koperasi*

Abstract

Background: Recently, the business world is facing a fairly severe financial crisis as a result of the impact of the Covid-19 pandemic.

Research purposes: Analyzing and obtaining evidence of whether cash flow, accounting profit differences and fiscal profit have an effect on the persistence of company profits at PT. XYZ.

Research methods: The research method used in this study is a quantitative method, which aims to collect, manage, test, and analyze data in the form of numbers to determine the effect of cash flows and differences in accounting and fiscal profits on earnings persistence.

Research results: According to the results of the simultaneous F test, a significance result of 0.016 is obtained which is lower than 0.05, which means that the independent variables (capital intensity ratio, free cash flow and benefits) have an effect on the dividend variable.

Conclusion: Based on the results of the study, operating cash flow has a positive and significant effect on earnings persistence. This means that the higher the operating cash flow of a company, the persistence of company profits will also increase. The difference between accounting profit and fiscal profit has a significant positive effect on earnings persistence, which means: it means that the higher the difference between accounting profit and fiscal profit, the lower the persistence of a company's profit.

Keywords: *System, Internal Control, Audit, Cooperative*

Diterima: 26-12-2021; Direvisi: 29-12-2021; Disetujui: 6-01-2022

PENDAHULUAN

Pancasila dan UUD 1945 menyebutkan bahwa tiga pelaku ekonomi yang mendasari sistem perekonomian Indonesia yaitu BUMN, BUMS, dan Koperasi (Afifudin, 2020). Terdapat banyak jenis koperasi yang ada di Indonesia yang terbagi dari jenis koperasi berdasarkan tingkatannya dan jenis usahanya (Rosaninda, 2014). Menurut data statistik koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam tercatat sebanyak 16.435 unit koperasi. Dengan banyaknya koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam di dalamnya pasti terdapat piutang yang besar (Simanjuntak, 2019). Sebagian besar dari total aktiva dalam suatu koperasi simpan pinjam adalah piutang (Rahma, 2018). Dengan adanya pemberian piutang, koperasi mempunyai risiko berupa kerugian apabila debitur tidak dapat membayar hutang atau kewajibannya (Bernardin & Chaniago, 2017). Sistem pengendalian internal merupakan salah satu yang digunakan dalam mengantisipasi kecurangan dan mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih (Larasati et al., 2013).

KPRI Kokardan merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam (Bonifacio & Sihite, 2021). Dengan demikian koperasi pasti memberikan pinjaman kepada anggotanya sehingga menimbulkan piutang (Susanto, 2010). KPRI Kokardan sebagai koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam memiliki risiko kredit macet. Adanya piutang macet yang tinggi dalam sebuah koperasi simpan pinjam akan menyebabkan tingkat pengembalian piutang semakin kecil (Hulu, 2018), sehingga koperasi tersebut mengalami kesulitan untuk menyalurkan dana kembali kepada anggota (Oesman, 2010).

Pada tahun 2017 dan tahun 2020 piutang macet mengalami kenaikan yang sangat tinggi (Faozani et al., 2020). Maka itu KPRI Kokardan harus menjalankan Sistem Pengendalian Internal piutang lebih efektif dan efisien untuk keberlangsungan koperasi ke depannya. Untuk menilai Sistem Pengendalian Internal pada koperasi dapat menggunakan berbagai cara salah satunya menggunakan komponen COSO (*the Committee of Sponsoring Organizations*) (Faozani et al., 2020). Jika dilihat dari komponen COSO KPRI Kokardan belum menerapkan komponen secara baik karena sebagian belum dilaksanakan oleh koperasi. Seperti komponen lingkungan pengendalian intern koperasi belum mempunyai peraturan kode etis kerja untuk karyawan secara tertulis (Susanti, 2017), komponen kegiatan pengendalian yaitu pemisahan tugas yang layak belum sepenuhnya layak karena bagian penagihan piutang masih dilakukan oleh bendahara (Aprita, 2010) sehingga terjadi rangkap tugas, serta komponen informasi dan komunikasi ada informasi yang lambat ke anggota yaitu laporan bulanan potongan piutang tidak secara cepat sampai pada anggota. Dalam komponen monitoring juga KPRI Kokardan belum melaksanakan secara penuh pemantauan pinjaman yang telah diberikan kepada anggota.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan sistem pengendalian internal, prosedur sistem pengendalian internal piutang, penilaian sistem pengendalian internal piutang dan mengetahui upaya perbaikan sistem pengendalian internal piutang.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan studi pustaka. Dalam menggunakan metode analisis data, penulis mengacu pada teknik yang umum digunakan oleh para peneliti, yakni metode analisis data model interaktif (Sugiyono, 2019: 321).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Sistem Pengendalian Internal Pada KPRI Kokardan

Jika dilihat dari prinsip COSO Sistem Pengendalian Internal piutang di KPRI Kokardan masih ada yang belum dilaksanakan. Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh koperasi adalah dari komponen lingkungan pengendalian (Putri & Endiana, 2020) yaitu integritas dan nilai-nilai etis, komitmen dan kompetensi, dan struktur organisasi sedangkan yang tidak ada partisipasi komite audit (Butar-Butar, 2017) dan dewan direksi karena dikoperasi tidak ada dewan direksi, falsafah manajemen dan gaya operasi karena di KPRI Kokardan tidak memiliki manajer semua aktivitas pengendalian atas perintah ketua pengurus. Komponen pertimbangan risiko koperasi melaksanakannya dengan melakukan kerjasama dengan BJB untuk pemotongan Tukin ini dilakukan dengan baik. Komponen kegiatan pengendalian KPRI Kokardan dalam menjalankan pemisahan tugas yang layak belum sepenuhnya masih adanya rangkap jabatan dalam penagihan hutang ke anggota, otorisasi yang layak sudah dilakukan setiap transaksi di koperasi selalu mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, dokumen dan catatan yang layak seperti adanya faktur setiap transaksi namun dalam kartu piutang tidak terdapat nomor urut dan adanya pengecekan (pemeriksaan) sudah ada setiap triwulan sekali (Hidayah, 2021).

Prosedur Sistem Pengendalian Internal Piutang KPRI Kokardan

Prosedur Sistem Pengendalian Internal piutang di KPRI Kokardan ada lima bagian terkait yaitu anggota, bagian kartu, bagian potongan, bagian keuangan/bendahara, bagian pembukuan dan bank BJB. Prosedur ini dimulai dari anggota yang mengajukan permohonan pinjaman yang nantinya bagian kartu akan mengecek dan menyiapkan data peminjam. Data peminjam diberikan kepada bendahara untuk melakukan proses layak atau tidaknya diberikan pinjaman. Jika layak maka bagian keuangan akan mengeluarkan faktur kas keluar empat (4) rangkap yang akan disebar ke bagian kartu dan bagian pembukuan untuk dilakukannya pencatatan untuk dijadikan data koperasi. Data-data anggota yang meminjam akan diserahkan oleh bagian potongan ke bank BJB. Bank BJB akan memotong Tukin sesuai data dari koperasi dan akan menghasilkan laporan potongan yang akan dikirim ke bagian potongan koperasi.

Ada beberapa prosedur yang tidak dapat dipatuhi oleh anggota yaitu yang dalam menulis surat permohonan pengajuan pinjaman tidak mau menuliskan atas dasar keperluan apa anggota meminjam uang pada koperasi dan kartu kredit tidak diberikan nomor urut padahal itu adalah bagian prosedur yang harus diisikan agar pihak koperasi sehingga koperasi dapat melakukan pengendalian dengan baik.

Penilaian Sistem Pengendalian Internal Piutang KPRI Kokardan

Penilaian sistem pengendalian internal piutang KPRI Kokardan, peneliti menggunakan daftar pertanyaan checklist terlampir yang nantinya akan peneliti cocokan dengan keadaan koperasi. Dari jawaban masing-masing informan ada yang tidak sinkron dengan kenyataan, seperti salah satu informan menyebutkan kartu kredit diberikan nomor urut cetak namun pada kenyataannya tidak semua diberikan nomor urut.

Upaya Perbaikan Sistem Pengendalian Internal Piutang KPRI Kokardan

Melakukan pengawasan lebih lanjut tentang sistem pengendalian internal piutang untuk anggota koperasi yang meminjam agar tidak terjadinya piutang tak tertagih, menekan anggota untuk mau menandatangani potongan Tukin, mungkin juga akan menambah syarat untuk peminjam yaitu harus mau dipotong Tukin yang hal ini mungkin nanti ada SOP yang dituangkan dalam AD/ART.

Keberadaan Sistem Pengendalian Internal KPRI Kokardan

Secara umum, sistem pengendalian internal untuk piutang yang telah diterapkan pada KPRI Kokardan mencakup hal-hal yaitu adanya pembatasan jumlah pinjaman dan maksimal lamanya jatuh tempo, adanya prosedur dalam pemberian pinjaman, adanya sistem pemotongan Tukin untuk angsuran bulanan anggota, semua transaksi pemberian pinjaman, pemberian potongan dan penghapusan piutang, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Dari segi komponen pengendalian intern COSO pengendalian intern piutang usaha pada KPRI Kokardan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Lingkungan Pengendalian

Integritas dan Nilai-nilai Etis

Ketua telah menetapkan adanya peraturan-peraturan berupa etika dan perilaku dalam bekerja. Peraturan yang telah ditetapkan kemudian akan dikomunikasikan pada staf karyawan untuk dilaksanakan. Namun ketua belum menetapkan secara tertulis peraturan etika dan perilaku kerja untuk staf karyawan, ketua hanya menyampaikannya secara lisan. Hal ini akan membuat peluang staf karyawan melanggar peraturan karena tidak adanya aturan secara tertulis yang jelas, aturan secara tertulis hanya ada pada jadwal masuk kerja.

Komitmen dan Kompetensi

KPRI Kokardan sudah merekrut karyawan yang memiliki kompetensi, jujur, mempunyai motivasi untuk terus berkembang serta memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya. Seperti di bagian kartu diduduki oleh karyawan lulusan sarjana yang sesuai dengan bidang keuangan. Karyawan koperasi juga telah mendapatkan pelatihan perkoperasian agar semakin paham dengan aktivitas koperasi. Namun KPRI Kokardan belum menetapkan pelatihan bagi anggotanya, pelatihan koperasi ini hanya bagi karyawan koperasi dan dilaksanakan jika Dinas Koperasi atau Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) mengadakan pelatihan. Pelatihan perkoperasian untuk anggota juga penting agar anggota tahu hak dan kewajiban dalam berkoperasi dan mendalami aktivitas koperasi sehingga anggota tidak seenaknya dalam berkoperasi.

Partisipasi Komite Audit dan Dewan Direksi

Di KPRI Kokardan tidak ada dewan direksi. Dalam koperasi yang berkedudukan paling tinggi adalah rapat anggota. Adanya rapat anggota dalam koperasi sebagai lembaga formal untuk semua anggota. Pada koperasi yang menjadi pemilik koperasi adalah anggota. Anggota mempunyai hak yang sama untuk memajukan perkembangan koperasi. Selanjutnya terdapat pengurus yang menjadi kedudukan tinggi setelah rapat anggota karena dengan adanya pengurus dokumen penting yang menyangkut aktivitas koperasi harus diotorisasi dan disetujui pengurus. KPRI Kokardan minimal triwulan mengadakan pertemuan dengan pengawas koperasi dan audit untuk memantau dan mengevaluasi kinerja koperasi serta laporan keuangan koperasi.

Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi

Pada KPRI Kokardan tidak terdapat manajer yang ada ketua pengurus koperasi. Yang memberi sinyal untuk melakukan pengendalian internal adalah ketua pengurus. Dalam mempertimbangkan risiko ketua dibantu dengan pengurus atau bawahannya. Misalnya seberapa jauh ketua pengurus mempertimbangkan risiko yang terjadi pada koperasi. Hal ini akan memberikan gambaran ketua pengurus terhadap pengendalian internal.

Struktur Organisasi

KPRI Kokardan telah membentuk struktur organisasi, adanya pembagian tugas (job description) dan fungsi ini merupakan bukti bahwa adanya komitmen mengenai kompetensi karyawan. Namun KPRI Kokardan belum mempunyai bagian piutang khusus untuk menganalisis pinjaman dan petugas penagihan pinjaman. Analisis pinjaman masih dilakukan oleh bendahara. Analisis pinjaman ini penting agar terjadinya keselarasan

antara hal yang sudah disepakati. Adanya rangkap jabatan untuk menangani bagian piutang seperti bendahara yang merangkap juga sebagai bagian penagihan piutang bisa juga bagian penerimaan setoran yang menjadi bagian penagihan piutang. Bagian operator bisa saja difokuskan untuk menjadi bagian khusus penagihan piutang.

Pertimbangan Risiko

Dalam koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam, piutang merupakan aktiva terbesar dan berperan penting. Namun risiko terbesar dalam koperasi simpan pinjam adalah adanya piutang macet atau anggota tidak dapat melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Maka dari itu KPRI Kokardan melakukan pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) anggota koperasi. Namun hal itu tidak berjalan dengan efektif. Banyak anggota yang tidak mau membuat surat pernyataan potongan Tukin dan adanya anggota yang tidak mempunyai Tukin atau Tukin tersebut telah diberikan kepada bank lain untuk melunasi pinjaman anggota kepada bank tersebut. Untuk yang tidak membuat surat pernyataan dan tidak ada Tukin setoran piutang berdasarkan kesadaran sendiri.

Kegiatan Pengendalian

Berikut adalah kegiatan piutang sebagai berikut:

- 1) Kegiatan piutang dilakukan oleh bagian kartu dan persetujuan piutang dilakukan oleh bendahara
- 2) Kegiatan tanggung jawab dan kewenangan mutasi piutang dilakukan oleh bagian kartu dan potongan serta bendahara
- 3) Kegiatan pemisahan tugas oleh masing-masing bagian atau fungsi yang berhubungan dengan piutang usaha antara lain :

- a. Bendahara terpisah dengan bagian kartu.

Bendahara berfungsi untuk menyetujui dan merealisasikan dana pemberian piutang sedangkan bagian kartu untuk penerima anggota yang ingin melakukan pinjaman

- b. Bendahara terpisah dengan bagian pembukuan

Bendahara berfungsi untuk merealisasikan dana pemberian piutang dan bagian pembukuan untuk pencatatan laporan pinjaman anggota.

- c. Bagian pembukuan terpisah dengan bagian kartu dan potongan

Transaksi piutang dilaksanakan oleh bagian kartu. Jika transaksi piutang disetujui bendahara mengeluarkan faktur pengeluaran kas empat rangkap untuk diberikan pada bagian kartu, bagian pembukuan, penerima dan bendahara sebagai arsip.. Dan jika anggota yang ingin membayar piutang transaksi akan diproses oleh bagian kartu, diserahkan ke bagian penerimaan setoran dan bendahara..

- d. Bagian yang bertugas menyetorkan kas di bank terpisah dengan pemegang buku piutang.

Bagian yang menyetorkan uang di bank adalah bendahara yang terpisah dari bagian pemegang buku piutang.

Namun KPRI Kokardan belum mempunyai bagian untuk penagihan piutang kepada anggota. Penagihan piutang dilakukan oleh bendahara sehingga adanya rangkap jabatan.

Informasi dan Komunikasi

Informasi mengenai piutang pada KPRI Kokardan adalah berupa informasi dari setiap bagian yang membidangi, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi dari bagian kartu simpanan dan pinjaman mengenai calon peminjam saat ini. Informasi ini bertujuan untuk menilai apakah calon peminjam tersebut layak untuk diberikan kredit atau tidak. Dokumen yang berkaitan dengan informasi ini adalah formulir surat permohonan pinjaman yang berisi nama, unit kerja, alasan keperluan meminjam uang, jumlah uang, jangka waktu, angsuran bulan, persetujuan

bendahara/juru bayar gaji, persetujuan anggota yang meminjam dan tanggal mengajukan surat permohonan

2. Informasi mengenai jumlah tukin anggota apakah mencukupi atau tidak
3. Informasi mengenai data anggota seperti nama, alamat dinas, jumlah simpanan dan pinjaman, dan kemajuan pembayaran pada koperasi.

Informasi di atas dapat dicari pada kartu simpanan dan pinjaman serta informasi data dari bank mengenai Tukin anggota. Sehingga data tersebut akan di gunakan sebagai alat pengambilan keputusan apabila anggota koperasi ingin meminjam pada koperasi. Namun untuk informasi mengenai laporan potongan Tukin tidak dikirim secara tepat oleh koperasi atau bagian potongan. Hal ini akan membuat anggota tidak mengetahui jumlah potongan. Padahal ini perlu sebagai bukti bahwa anggota sudah membayar angsuran kepada koperasi.

Monitoring

Monitoring telah dilakukan oleh pengurus koperasi untuk memonitor anggota baik sebelum dan setelah kredit diberikan. Hal ini bertujuan untuk peningkatan pengendalian piutang yang efektif. Namun kenyataannya monitoring tidak begitu berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya anggota yang tidak dapat memenuhi pelunasan piutangnya.

KPRI Kokardan juga telah ditetapkan adanya pengawasan oleh pengawas koperasi yang bertujuan untuk mengawasi aktivitas koperasi, dan seluruh aktivitas yang terkait dengan pengurus dan karyawan dimasing-masing bagian. Selain pengawasan yang dilakukan pengawas koperasi KPRI Kokardan juga diawasi oleh audit ekstern dari Kantor Akuntan Publik.

Prosedur Sistem Pengendalian Internal Piutang KPRI Kokardan

Prosedur sistem pengendalian internal piutang KPRI Kokardan yaitu:

- a) Anggota menulis amprahan atau formulir surat permohonan pengajuan pinjaman. Dalam formulir ini terdapat atribut nama, unit kerja, alasan keperluan meminjam uang, jumlah uang, jangka waktu, angsuran bulan, persetujuan bendahara/juru bayar gaji, persetujuan anggota yang meminjam dan tanggal mengajukan surat permohonan
- b) Bagian kartu melihat keadaan piutang anggota, jumlah Tukin mencukupi atau tidak dan kemampuan membayar kewajiban
- c) Jika disetujui oleh bendahara maka bendahara akan mengeluarkan faktur pengeluaran kas. Atribut dari faktur pengeluaran kas yaitu dibayarkan kepada siapa, tunai atau cek, jumlah uang dalam angka, jumlah uang dalam huruf, waktu jatuh tempo, angsuran di muali belan berapa, dana risiko 2% dikalikan dengan jumlah uang, tanggal pengeluaran faktur, persetujuan dari ketua, bendahara, pihak yang menerima, kolom yang harus diisi oleh bagian keuangan terdapat tanggal pembukuan, hal buku harian, paraf, nomor perkiraan, debit dan kredit. Faktur ini terdiri dari empat rangkap. Lembar pertama berwarna putih untuk pembayar, lembar kedua berwarna kuning untuk pertinggal, lembar ketiga berwarna merah untuk pembukuan, dan yang keempat berwarna biru untuk penerima
- d) Faktur pengeluaran kas diserahkan kepada bagian pembukuan untuk pencatatan
- e) Setelah selesai diproses maka bendahara harus memonitor tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati
- f) Data-data anggota yang meminjam ke koperasi akan di berikan kepada Bank BJB untuk dipotong Tukin. Setelah terinput dan terpotong bank akan membuat laporan potongan Tukin

- g) Laporan potongan Tukin akan diberikan ke koperasi di bagian potongan untuk dilakukannya pengecekan siapa saja anggota yang terpotong. Dan setelahnya laporan dikirim ke anggota.

Untuk pembayaran hutang anggota ke koperasi. KPRI Kokardan melakukan tagihan dengan surat atau secara langsung

1. Surat tagihan ini memberitahukan kepada anggota jumlah hutang dan tanggal jatuh tempo
2. Surat tagihan kemudian di antar ke alamat dinas atau rumah anggota
3. Jika dengan surat tidak ada tanggapan maka koperasi akan menagih langsung kepada anggota.

Dan untuk melunasi hutangnya anggota dapat membayarnya dengan cara yang telah ditentukan oleh pihak koperasi yaitu:

1. Dipotong langsung dari Tukin
2. Langsung ke koperasi
3. Transfer dengan menyertakan bukti transfer.

Penilaian Sistem Pengendalian Internal Piutang KPRI Kokardan

Sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokardan telah adanya pertanggungjawaban oleh karyawan dalam pencatatan semua transaksi piutang mulai dari membuat tabel umur piutang, pencocokan transaksi, anggota selalu mengkonfirmasi piutangnya pada bagian kartu dan potongan, semua transaksi didukung oleh faktur serta dalam dalam pemberian otorisasi semua dokumen atau faktur penting yang berkaitan dengan aktivitas koperasi selalu diotorisasi dan disetujui oleh ketua hal ini dilakukan agar pengendalian berjalan baik.

Namun ada beberapa hal yang belum terpenuhi dalam sistem pengendalian internal piutang sehingga sistem pengendalian internal kurang efektif yaitu:

1. Piutang ragu-ragu tidak diperiksa oleh petugas. Hal ini dikarenakan kurangnya kontrol oleh petugas karena tidak ada bagian khusus untuk memeriksa piutang anggota. Setelah piutang tak tertagih dihapus, tidak ada pengawasan logis terhadap penagihan yang dilakukan. Pada KPRI Kokardan jika piutang sudah dihapuskan maka piutang orang yang bersangkutan tidak diawasi lagi karena dianggap sudah selesai
2. Dalam faktur yang berkaitan dengan piutang tidak terdapat nomor urut atau nomor perkiraan, karyawan hanya menulis data nama, tanggal, dan nominal pinjamannya sedangkan nomor urut ini agar mempermudah dalam menemukan data. Dalam formulir pengajuan pinjaman, anggota tidak menuliskan keperluan apa yang dibutuhkan dengan pinjaman uang tersebut dan pihak koperasinya juga tidak menegurnya padahal ini merupakan salah satu prosedur dan pengendalian internal agar koperasi tahu uang yang dipinjamkan kepada anggota akan digunakan untuk apa
3. Laporan bulanan piutang belum dikirim secara tepat oleh karyawan, laporan akan tersampaikan pada anggota jika anggota tersebut menanyakan langsung datang ke koperasi dan laporan bulanan ditiptkan pada anggota yang datang. Laporan bulanan piutang tidak dikirim oleh bagian piutang. Pada KPRI Kokardan laporan bulanan piutang dicatat dan dipegang oleh bagian potongan. Bagian ini masih adanya hubungan dengan piutang namun bukan bagian khusus
4. Bagian kredit tidak dipisahkan dengan bagian pencatatan piutang. Pada KPRI Kokardan bagian kredit adalah bagian kartu. Sedangkan bagian pencatatan piutang juga adalah bagian kartu, potongan dan pembukuan. Tidak adanya rotasi jabatan di KPRI Kokardan rotasi jabatan ini perlu agar karyawan dapat berkembang dan

menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan maka akan lebih cepat diketahui oleh karyawan yang menggantikannya

5. Tidak terdapat jaminan dalam pemberian piutang hal ini menjadi kendala apabila anggota tidak membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka koperasi harus menanggungnya. Contohnya seperti ada salah satu anggota yang mempunyai tunggakan dan anggota tersebut meninggal, keluarga anggota tidak tahu bahwa yang meninggal mempunyai tunggakan. Dalam data-data koperasi tidak adanya alamat lengkap para anggota sehingga menyulitkan koperasi untuk menagihnya, di koperasi hanya ada alamat unit kerja saja. Hal ini menjadi kendala bagi koperasi dalam penagihan piutang anggota.

Upaya Perbaikan Sistem Pengendalian Internal Piutang KPRI Kokardan

Untuk memperbaiki sistem pengendalian piutang perlu dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal koperasi dan selalu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem piutang. Untuk upaya perbaikan sistem piutang melalui sistem pengendalian internal KPRI Kokardan harus melakukan rotasi jabatan jika memang bagian piutang khusus tidak ada, hal ini dilakukan agar tingkat kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dihindarkan. Laporan bulanan piutang akan dikirimkan setiap bulannya berupa soft file melalui bendahara dinas jika memang tidak sempat untuk mengirimkan hard file serta memperbaiki prosedur atau dokumen yang belum lengkap dalam hal piutang seperti data lengkap alamat anggota dan di dokumen akan ditambahkan nomor urut cetak dalam kredit memo piutang.

Selain itu, KPRI Kokardan akan selalu memonitor anggota yang mempunyai pinjaman, bekerjasama dengan pihak BJB untuk pembayaran melalui potongan Tukin yang anggota punya, menekan anggota yang tidak mau mengisi surat pernyataan potongan Tukin. Hal ini dilakukan agar sistem piutang berjalan dengan baik melalui sistem pengendalian internal agar piutang macet dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokardan yaitu jika dilihat dari komponen COSO, sistem pengendalian internal piutang KPRI Kokardan yaitu komponen lingkungan pengendalian piutang pada KPRI Kokardan cukup baik hal ini ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh ketua pengurus koperasi untuk dilaksanakan oleh karyawannya walupun peraturan ini belum tertulis secara jelas karyawan dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya dengan baik. Karyawan di KPRI Kokardan juga mempunyai sifat yang jujur, kompeten, mempunyai motivasi untuk terus berkembang serta memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya. KPRI Kokardan juga telah mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antara masing-masing bagian dalam koperasi. Dengan adanya pemberian wewenang tanggung jawab pada masing-masing staf membuat karyawan agar bertanggung jawab atas pekerjaannya, dengan begitu karyawan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang belum terpenuhi dalam komponen ini adalah belum adanya peraturan-peraturan tata kerja tertulis, pelatihan perkoperasian untuk anggota belum terlaksana, tidak adanya manajemen koperasi dan masih adanya rangkap jabatan. Komponen pertimbangan risiko kurang efektif hal ini ditandai dengan banyaknya anggota yang menunggak dan tidak mau menandatangani potongan Tukin. Komponen kegiatan pengendalian piutang kurang efektif dilihat dari masih adanya rangkap tugas dari bendahara menjadi bagian penagihan dan bagian kredit masih disatukan dengan catatan piutang yaitu bagian kartu. Komponen informasi dan komunikasi piutang kurang efektif

ditandai dengan informasi mengenai kegiatan piutang yang telah disampaikan oleh pengurus pada karyawannya ataupun dari karyawan kepada pengurus koperasi. Namun dalam informasi pada anggota, anggota tidak diberikan laporan potongan Tukin, hal ini mengakibatkan anggota tidak mengetahui jumlah potongan angsuran setiap bulannya. Komponen monitoring piutang berjalan kurang efektif, walaupun terdapat pemeriksaan setiap triwulan. Namun kurang efektifnya pengawasan pada anggota yang meminjam dapat dilihat dari meningkatnya anggota yang tidak dapat memenuhi pelunasan piutangnya. Prosedur sistem pengendalian internal piutang berjalan dengan cukup baik hal ini ditandai dengan adanya prosedur awal tahap pemberian pinjaman dengan mengajukan formulir permohonan pinjaman di bagian kartu, bagian kartu akan menyiapkan data anggota yang akan disampaikan kepada bagian keuangan/ bendahara untuk memutuskan layak atau tidaknya. Jika layak maka akan dikeluarkan faktur kas keluar dan dilakukannya pencatatan oleh bagian kartu dan bagian pembukuan. Setelah itu data anggota yang meminjam akan diberikan ke BJB untuk dilakukan pemotongan yang nantinya menghasilkan laporan potongan Tukin dan di serahkannya ke bagian potongan koperasi. Bendahara atau pengurus koperasi juga memonitor anggota yang meminjam. Penilaian sistem internal pengendalian internal piutang kurang efektif meskipun ada yang telah dilakukan. Yang belum dilakukan yaitu di KPRI Kokardan beberapa fungsi masih terkait atau ada rangkap jabatan dan tidak dilakukan rotasi jabatan, piutang ragu-ragu tidak diperiksa oleh petugas, laporan potongan Tukin tidak disampaikan kepada anggota, laporan tidak diawasi untuk menghindari intervensi sebeleum dikirim, tidak terdapat jaminan dalam pinjaman, memo kredit tidak diveri nomor urut, dan piutang yang sudah dihapuskan tidak terdapat pengawasan logis. Upaya perbaikan sistem pengendalian piutang dengan sistem pengendalian internal yaitu KPRI Kokardan harus memperbaiki komponen yang belum terlaksana dan selalu mengevaluasi atau memonitor anggota yang mempunyai pinjaman, bekerjasama dengan pihak BJB untuk pembayaran melalui potongan Tukin yang anggota punya dan menekan anggota yang tidak mau mengisi surat pernyataan potongan Tukin.

BIBLIOGRAFI

- Afifudin, A. (2020). Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang– Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 106–126.
- Aprita, E. (2010). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bernardin, D. E. Y., & Chaniago, M. S. (2017). Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Likuiditas Melalui Perputaran Piutang Pada Koperasi Harapan Jaya. *Jurnal ECODEMICA*, 1(2), 193–200.
- Bonifacio, A., & Sihite, M. (2021). Pengaruh Strategi Bisnis Berupa Kinerja Pengurus Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Anggota Serta Implikasinya Pada Keberhasilan Usaha Dengan Partisipasi Anggota Sebagai Variabel Moderator Di Kokapura-Jakarta. *EKOBISMAN-JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 6(1), 65–79.
- Butar-Butar, D. K. (2017). *Evaluasi Atas Audit Pengendalian Intern Terhadap Proses Pemberian Kredit Pada Pt. Finansia Multifinance (Kredit Plus)*. POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
- Faozani, F., Mulyatini, N., & Herlina, E. (2020). Pengaruh Modal Kerja Dan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Pt Kimia Farma Tbk Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2017). *Business Management and Entrepreneurship Journal*, 2(1), 142–154.
- Hidayah, Z. N. (2021). *Analisis penerapan sistem informasi akuntansi persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Madani Palu*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hulu, I. I. P. (2018). *Pengaruh Pengendalian Manajemen Terhadap Kolektibilitas Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (Ksp3) Nias Cabang Gunungsitoli*.
- Larasati, A., Yasa, I. W., & Dani W, I. (2013). *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995*. UNEJ.
- Oesman, A. W. (2010). Konsep Entitas Dalam Pencatatan Akuntansi Kredit Program Pada Koperasi Dan Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Eksis*, 6(1).
- Putri, P. A. Y., & Endiana, I. D. M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kecamatan Payangan). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 179–189.
- Rahma, F. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Berbasis Kelompok. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 9–20.
- Rosaninda, D. (2014). *Analisis penyebab dan langkah penanganan pembiayaan bermasalah di KOSPIN Jasa Layanan Syariah cabang Pemalang*. UIN Walisongo.
- Simanjuntak, R. Y. (2019). *Analisis pemahaman masyarakat tentang riba dalam koperasi simpan pinjam (studi kasus masyarakat Link. II Batunadua Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua)*. IAIN Padangsidimpuan.
- Susanti, D. L. (2017). *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Menggunakan Pendekatan COSO Studi Kasus Koperasi Warga Patra V*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Susanto, K. (2010). *Analisis Penerapan Akuntansi Koperasi Pada Koperasi Unit Desa (Kud) Sawit Jaya–Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)